

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 193
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA
UPTD PENGELOLANN PASAR KABUPATEN SIAK. (STUDI
KASUS PASAR TANJUNG MEDAN KECAMATAN PUSAKO
KABUPATEN SIAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**SITI NURBAYA
NPM : 167110884**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Nurbaya
NPM : 167110884
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar
Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020
Pembimbing,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Nurbaya
NPM : 167110884
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Peaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

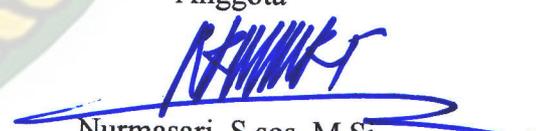
Ketua,


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Sekretaris


Kartius, S.Sos, M. AP

Anggota


Nurmasari, S.sos, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurbaya
NPM : 167110884
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (studi kasus pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Kartius, S.Sos., M. AP

Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si



Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

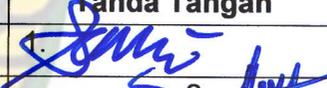
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 923/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Nurbaya
N P M : 167110884
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (Studi Kasus Pasar Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)**
Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 Oktober 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 923/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Siti Nurbaya
N P M	: 167110884
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Syapril Abdullah, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Kartius, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nurmasari, S.Sos., M.Si.. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat hidayahnya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak."

Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahannya terdahulu. Dengan mengucap "Allahumma Sholli' ala Muhammad Wa'ala Alihi Syayidina Muhammad' yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbuka lah berbagai hikmah Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Ilmu Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Lilis Suriani S.Sos, M.Si Selaku Ketua prodi Administrasi Publik dan jajaran dosen pada jurusan Ilmu Administrasi yg telah memfasilitasi serta

- membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 4 Bapak Eko Handrian S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
 - 5 Pembimbing I Bapak Drs.Syapril Abdullah ,M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
 - 6 Bapak dan Ibu Kepala UPTD Dinas pasar perdagangan dan Perindustrian,UPTD Pengelolaan Pasar, dan Rekan - Rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
 - 7 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
 - 8 Terkhususnya untuk Ayahanda Abdullah dan ibunda tercinta Sartinum yang slalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
 - 9 Kepada Abang ku Azman, Burhan dan Kakak ku Misri,Syarifah Aini,Royani serta Adikku Syaidah Dewi Nanda Yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 - 10 Kepada sahabat-sahabatku Budiman Putra, Nanda Mayola,Anggreni Israwati, Merliana Nurfitriah, Irma atb, Olin,khoirutama, Nita Arjuna dan

lainya yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi semangat serta dukungan materil maupun non materil dalam penyusunan Skripsi ini.

- 11 Kepada teman-teman seperjuangan semua mahasiswa Administrasi Publik kelas D angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Akhir kata ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulis skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Penulis

Siti Nurbaya

DAFTAR ISI

Halaman	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KOMPRESIF SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	17
C. Tujuan dan kegiatan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17

BAB II KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Administrasi	19
2. Konsep Organisasi	23
3. Konsep Manajemen	27
4. Konsep kebijakan	31
5. Konsep kebijakan publik	34
6. Konsep Implementasi	36
7. Konsep Pasar	40
8. Konsep Pengelolaan	48
B. Kerangka Pikir	50
C. Hipotesis.....	51
D. Konsep Operasional	51
E. Operasional Variabel	53
F. Teknik Pengukuran	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi Dan Sampel	60
D. Teknik Penarikan Sampel	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	61
F. Teknik Pengumpul Data.....	62
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	63
BAB IV DESKRPSI LOKASI PENELITIAN.....	65
A.Keadaan Geografis Kabupaten Siak.....	65
B.Sejarah Kabupaten Siak.....	66
C. Profil Desa Dosan Kecamatan Pusako	68

D. Letak Geografis Desa Dosan Kecamatan Pusako	70
E. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak....	71
F.Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak...	73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Identitas Responden	79
1. Tingkat Usia	79
2. Jenis Kelamin	80
3. Tingkat Pendidikan	81
B. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).....	82
1.Komunikasi	82
2.Sumber Daya	86
3.Disposisi	90
4. Struktur Birokrasi	93
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak(Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)	98
BAB VI PENUTUP	100
A.Kesimpulan.....	100

B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	107



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	HALAMAN
1.1 Jumlah Los Pasar Tanjung medan Desa Dosan Kecamatan Pusako.....	10
1.2 jumlah pasar kecamatan pusako kabupaten siak.....	11
1.3 Pungutan Restribusi Pasar Tanjung Medan Desa Dosan KecamatanPusako.....	12
1.4. Hasil Musyawarah Pembangunan Pasar di Kecamatan Pusako Desa Dosan	13
II.2. Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak(Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).....	54
III.1. Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak(Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).....	61
V.1. Identitas Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Berdasarkan Tingkat Usia	80
V.2. Identitas Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
V.3. Identitas Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Berdasarkan tingkat pendidikan.....	81
V.4. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi	

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak	83
V.5. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak	87
V.6. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak	91
V.7. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak	94
V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Kecamatan pusako mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak	97

DAFTAR GAMBAR

II.I . Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan , Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.....	50
IV.1 Bagian Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten siak.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuisioner untuk Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)107
2. Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas UPTD Pengelolaan Pasar mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)112
3. Daftar Wawancara untuk Kepala Pengelolaan Pasar Tanjung Medan, mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Pengelolaan Pasar dan Retribusi pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)113
4. Rekapitulasi Telly Kuisioner Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak) ...114
5. Dokumentasi Foto penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)115
6. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik123
7. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau124

8. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pemerintah Kota Pekanbaru125
9. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.....126



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurbaya
NPM : 167110884
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Public
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(studi kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah:
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas:
3. Bahwa, apabila ia kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Penulis,

Siti Nurbaya

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIAK NOMOR 193
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN
PASAR KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS PASAR TANJUNG MEDAN
KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK)

ABSTRAK

Oleh

Siti Nurbaya

Kata Kunci, Implementasi, Peraturan Bupati, Pengelolaan Pasar

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentuk, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (Studi kasus Pasar Tanjung Medan kecamatan Pusako Kabupaten Siak). Indikator penilaian yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Organisasi. Tipe Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan lokasi penelitian. Adapun Populasi dan Sampel pada peneliti ini yaitu berjumlah 26 orang, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak dikategorikan Cukup Terimplementasi. karena tata letak pasar yang tidak strategis dan fasilitas pasar yang tidak memadai seperti kios, los, jalan menuju pasar toilet umum, musholla dan lain sebagainya kurangnya para pedagang yang ada di pasar Tanjung Medan Desa Dosan dikarenakan pembeli yang sedikit yang mengakibatkan pendapatan redistribusi menurun. Maka Dari itu pemerintah desa akan melakukan upaya-upaya untuk pembangunan Pasar Tanjung Medan Desa Dosan seperti penyediaan fasilitas yang mendukung, seperti kios, los, jalan menuju pasar toilet umum dan lain sebagainya, kemudian menghimbau kepada masyarakat supaya berbelanja di Pasar Dosan agar Pasar yang ada di Desa Dosan bisa berkembang pesat.

IMPELEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENT OF SIAK DI
STRICT NUMBER 193 YEAR 2017 CONCERNING THE
ESTABLISHMENT, POSITION, ORGANIZATION, OF THE ORGANIZATION,
ASSIGMENTS, AND WORKING PROCEDURES OF THE UPTD OF
MARKET MANAGEMENT IN SIAK DISTRICT (CASE STUDY OF THE
TANJUNG MEDAN KECAMATA SIAK)

ABSTRACT

By

Siti Nurbaya

Keyword: Implementation, Regent regulation, Market Management

This study is determine and analyze the implementation of regent regulation Number 193 of 2017 concerning, formation, position, Organizational structure, task, and work prosedures of UPTD Market Management in Siak Regency (Case study of Tanjung Medan Market, Pusako District, Siak Regency). The assesment indicators used include commucation, Rsources, Disposition, Organizational Structure. This type of research uses descriptive quantitative, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and data collectd by this tool is the used as the main raw material for analyzing empirical conditions and the objective of existence. The purpose of the research location. The population and sample in thus research were 26 people. types an data collection teachnique used consisted of frimary data collected using questionnaires and interviews and scondary were collected using observation. While the data analysis tecahnique used us by using a sampling teachnique. Based on this analysis teachnique, the researchers assessed and concluded that the implementation of the siak Regencyb Regent regulation Number 193 of 2017 concerning te formation, position organizational structure, duties, and work procedures of UPTD market managements in Siak Regency are categorized as moderately Implemented because of the non –strategic market layout and market facilities. Inadequate shops such as kiosks, booths, roads to the public, toilet market, players rooms and ao on, the lack of traders in the tanjung medan market, Dosan Village. Due to the small number of buyers who result in decreased revenue from fees, the village government will make efforts to development of the Tanjung Medan Market, Dosan Villaage, Such as Providing supporting facilities, such kiosk, booths roads to the public toilet market and so on. Then appeal to the public to the shop at dosan market so that market in Dosan Village can develop rapidly.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi juga di bedakan menjadi dua yaitu, Administrasi dalam arti luas dan arti sempit. Administrasi dalam arti luas seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna, sedangkan dalam arti sempit kegiatan yang meliputi dari catat- mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan , ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan.

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya- sumberdaya organisasi secara teratur dan benar.

Organisasi Menurut James. D. Moneey (dalam Zulkifli, 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang- orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumber dayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat di perlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya –

sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan- tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.

Kebijakan Menurut Young dan Quin adalah tindakan yang di buat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansal untuk melakukannya (Dalam Suharto,2005:44).lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Implementasi menurut Hinggis (dalam Pasalong, 2007:57) adalah implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan di indonesia pada dewasa ini tidak lepas dari peranan pasar. Ditengah pembangunan bangsa Indonesia, peran pasar tradisional yang semestinya menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan justru terabaikan.kondisi pasar tradisional yang terpuruk membuat masyarakat di indonesia lebih memilih berbelanja di pasar modren yang lebih tertata, bersih dan nyaman.Maka dalam hal mengelola pasar tradisional dengan baik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Penataan dan pembinaan pasar rakyat/ pasar tradisional itu

sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang, ditengah makin berkembangnya suatu usaha berskala besar.

Negara Indonesia merupakan Negara sedang berkembang dimana tidak sedikit masyarakat memiliki status sosial menengah kebawah, artinya selain masyarakat kaya terdapat masyarakat yang kurang mampu . untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari masyarakat tersebut dapat berbelanja di pasar yang di disediakan oleh pemerintah di mana terdapat dua macam pasar, yaitu pasar modren dan pasar tradisional.dalam hal ini masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah cenderung memilih pasar tradisional sebagai tempat untuk membeli keperluan sehari- hari , karena pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan di tandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui tawar menawar harga dimana harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih tawar menawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modren kalau pasar modren tidak bisa tawar menawar dia mempunyai layanan yang baik.

Kondisi seperti ini seolah- olah mengharuskan masyarakat terutama masyarakat yang berstatus sosial menengah kebawah untuk memilih berbelanja di pasar tradisional dibandingkan berbelanja di sebuah supermarket atau semacamnya dengan harga yang sedikit lebih mahal. Dimana sebuah kebutuhan mulai dari sandang pangan hingga produk elektronik tersedia di pasar tradisional, selain produk yang jual sangat lengkap harga produk – produk tersebut pun cenderung lebih murah dengan kualitas yang cukup bagus.

Istilah pasar dalam hal ini di artikan sebagai wadah atau tempat sekalung wahana proses jual beli barang sebagai kebutuhan sehari- hari seperti sembako, pakaian sayur mayur, dan buah- buahan yang di sebut sebagai pasar tradisional.istilah pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya sejumlah penjual dan pembeli dimana transaksi jual beli barang yang ada disana. Proses pindahan hak milik barang terjadi setelah penjual dan pembeli bersepakatan harga pasar yang demikian di sebut juga pasar konkret/ sandang (Winardi,1992.20)

Pasar merupakan salah satu cara perekonomian sebagai pusat kegiatan pembelanjaan yang di perlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Untuk sarana pasar yang disediakan oleh pemerintah kabupaten siak yang memberi wewenang UPTD Dinas pasar perdagangan dan perindustrian sebagai penertiban pasar yang melakukan penertiban tersebut yang di harapkan memberi kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar.

Ciri- ciri pasar tradisional :

1. Proses jual beli melalu tawar menawar harga
2. Barang yang disediakan umumnya barang keperluan harian rumah tangga yang di jualkan oleh masyarakat sekitar
3. Harga yang relatif murah
4. Area yang terbuka dan tidak ber-AC

Kabupaten Siak yang merupakan daerah yang di berikan otonomi untuk melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi berupaya untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Kabupaten Siak banyak memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan seperti dibidang perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sebagian penduduk yang bekerja di bidang rumah sakit, guru, Perkantoran .Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan,122 Desa. Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Siak salah satunya adalah Kecamatan Pusako yang memiliki 7 Desa. Desa Sungai Berbari 726, Desa Sungai limau 891, Desa Dosan 1.329, Desa Benayah 1.430, Desa Pebadaran 711, Desa Dusun Pusako 621, Desa Perincit 621. dalam kebijakan ini tidak semua kecamatan, kelurahan Desa merasakan kemajuan pasar desa yang mereka miliki adapun salah satu pasar tepatnya di pasar tradisional di Desa Dosan Kecamatan Pusako yang biasanya beroperasi setiap hari sabtu ini jauh dari kata maju ataupun berkembang banyak warga engan berbelanja di sana di karenakan tempat jauh dari pemukiman sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di desa lain ketimbang berbelanja di desa mereka sendiri.

Sehingga untuk menjadikan pasar tradisional lebih baik dan berkembang sebagaimana mestinya pemerintah mengatur beberapa peraturan sudah ada melalui peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan peraturan ini dibentuk UPTD pengelolaan Pasar Kabupaten Siak Kelas A, merupakan organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu dari fungsi perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi
 - a. Pengelolaan operasional, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar.
 - b. Membina perdagangan pada pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Siak.
 - c. Pemungutan Retribusi.
 - d. Membantu menyediakan informasi teknis perdagangan di pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Siak.

Tugas teknis yang dimaksud pada ayat (1) diatas masing- masing mempunyai tugas yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang untuk merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tiap masing-masing tugas yang telah diberikan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

1. UPTD Pengelolaan pasar Kabupaten Siak dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. UPTD Pengelolaan pasar Kabupaten Siak merupakan bagian dari Dinas perdagangan dan perindustrian

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

1. Susunan organisasi UPTD pengelolaan Pasar Kabupaten Siak terdiri atas:
 - A. Kepala UPTD
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok jabatan fungsional
 1. Sub bagian Tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian Tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
 2. Struktur Organisasi UPTD pengelolaan pasar Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

1. Kepala UPTD menjalankan tugas:
 - a. Menyusun rencana program kerja, dan kegiatan UPTD pengelolaan pasar kabupaten siak
 - b. Mengawasi, mengkoordinasikan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pengendalian Area dan Sarana kelengkapan pasar
 - c. Membina pedagang dalam rangka pemanfaatan Area Pasar.
 - d. Membantu penyediaan informasi harga kebutuhan pokok masyarakat, ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - e. Mengawasi dan mengendalikan keamanan dan ketertiban pasar.
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan di area pasar berkoordinasikan dengan instansi terkait.
 - g. Membantu pengawasan ukuran takaran, timbangan dan perlengkapannya(UTTP) yang telah memiliki tanda tera syah koordinasikan dengan instansi terkait;
 - h. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD pengelolaan pasar kabupaten Siak.
 - i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan restribusi pasar

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

1. Kepala UPTD dan kassubag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
2. Kepala UPTD dan Kassubag TU melaksanakan sistem pengendalian Internal di lingkungan unit kerjanya.
3. Kepala UPTD dan Kassubag TU bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala UPTD dan Kassubag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya

Dalam pengelolaan pembangunan pasar. Pasar dikelola oleh pemerintah Daerah (Dinas perdagangan dan perindustrian) dan terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan / rumah tangga yang pengelolaannya masih tradisional. Kondisi fisik tempat usaha permanen terdiri dari los dan kios yang dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu dan peralatan kebersihan terjaga dengan baik serta kondisi parkir yang belum memadai. Barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti (barang primer dan sekunder), bahan pangan pokok yang tidak tahan lama cukup menonjol. Barang

yang dijual umumnya lebih segar dan bervariasi dan harga barang relatif murah tidak bersifat mati dan dapat ditawarkan.

Tabel 1.1

Jumlah Los Pasar Desa Dosan

Los	Unit yang di tempati	Unit yang tidak ditempati	Jumlah
Model A	25	10	35
Model B	17	15	32
			67

Sumber: Kantor Desa Dosan Kecamatan Pusako 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Dosan mengenai jumlah los yang tersedia sebanyak 67 unit dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. kelompok A terdiri dari 35 dan kelompok B terdiri dari 32 unit los. Namun berdasarkan data yang diperoleh kelompok A berisi 25 unit dan yang tidak di tempati berjumlah 10 unit. Namun dari 25 unit yang terisi ada beberapa pedagang yang menempati los lebih dari 10 unit. Sedangkan kelompok B hanya terisi 17 unit dari 32 unit sama halnya dengan kelompok A di kelompok B pedagang menempati beberapa unit dengan pedagang yang sama.

Banyaknya los yang tidak di tempati karena memang pedagang tidak tertarik untuk berdagang dan melihat kondisi pasar letaknya jauh dari pemukiman masyarakat dan pembelinya kurang. Jadi los-los yang telah dibangun banyak yang tidak digunakan. Lebar bangunan los yaitu 80 M dan panjangnya 160 M. lapak adalah tempat para pedagang menjual barang terletak di luar bangunan. Lapak ini

di buat menggunakan kayu- kayu tiangnya terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari seng ada juga pakai rumbia.aktivitasnya berdagangnya diluar gedung yang membuat tempat jualan sendiri yang masih diarea pasar tersebut.

Berdasarkan data yang di Peroleh UPTD Pasar Kabupaten Siakbahwa Pasar yang ada di Kecamatan Pusako Berjumlah 5 pasar dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah Pasar Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

NO	Nama Desa	Nama Pasar	Jumlah pedagang/ pembeli
1	Desa Pusako	Pasar Kamis	50 orang
2	Desa Benayah	Pasar Buah Kail	65 orang
3	Desa Dosan	Pasar Tanjung Medan	30 orang
4	Desa Sungai Limau	Pasar kali Jeruk	55 orang
5	Desa Berbari	Pasar Selasa	40 orang

Sumber : Dinas Pasar Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel diatas,dapat diketahui bahwa jumlah pedagang pasar Kecamatan Pusako terletak pada Pasar kamis sebanyak 50 orang, pasar Buah Kail 65 orang, Pasar Tanjung Medan 10 Orang, Pasar Kali Jeruk 55 orang, Pasar Selasa 40 orang. Sehingga saya tertarik meneliti tentang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako.

Tabel 1.3 Pungutan Restribusi Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako.

No	Perbulan	Hasil
1	Juni 2018	Rp. 570.000
2	Juli 2018	Rp.550.000
3	Agustus 2018	Rp. 500.000
4	September 2018	Rp. 500.000
5	Oktober 2018	Rp . 480.000
6	November 2018	Rp. 450.000
7	Desember 2018	Rp. 400.000
8	Jauniari 2019	Rp. 350.000
9	Februari 2019	Rp.350.000
10	Maret 2019	Rp 300.000
11	April 2019	Rp 300.000
12	Mey 2019	Rp .300.000

Sumber : Dinas Pasar Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan restribusi pasar dari bulan juni 2018 sampai januari 2019 yang berjumlah Rp. 570.000 menjadi Rp. 300.000. hal ini di akibatkan kurangnya pedagang dan pembeli di pasar tersebut.

**Tabel 1.4 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan pasar kecamatan
pusako di Desa Dosan**

No	Tahun	Indikator Kinerja Program /kegiatan	Lokasi	APBD Kab. Siak	Realisasi
1	2014	Pembangunan pasar dan Distribusi barang/ produk (pengembangan sarana dan prasarana pasar Kec. Pusako	Jumlah sarana dan prasarana pasar terbangun	2,0000.000.000.00	Berbnetuk Usulan
2	2015	Pengembangan pasar dan Distribusi barang/ produk (pengembangan sarana dan prasarana pasar Kec. Pusako	pasar terbangun Jumlah sarana dan prasarana	2,0000.000.000.00	1.200,000.000
3	2016	Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk (pengembangan sarana dan prasarana pasar kec. Pusako.	Jumlah sarana dan prasarana pasar terbangun	2,0000.000.000.00	400.000.000

Sumber: Kantor Camat Pusako

Hasil musyawarah rencana pembangunan pasar kecamatan yang berada di RT.003/RW.002 Desa Dosan yang luasnya 2 hektar merupakan sebagaimana

sarana jual- beli masyarakat yang berda dikecamatan Pusako sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa- desa yang ada.

Desa Dosan merupakan Pasar Kecamatan yang memang langsung di kelola oleh Dinas Pasar. Dari tujuh desa terdapat empat Pasar yang mempunyai kendala masing-masing seperti yang saya teliti di Desa dosan nama pasar Tanjung medan.bahwasanya anggaran 2.000.000.000.00 untuk di desa Dosan karena Dosan akan dijadikan pasar induk kecamatan. alasanya Desa Dosan dijadikan pasar induk oleh kecamatan karena desa Dosan memiliki lahan untuk membangun pasar sebesar 2 hektar sedangkan di desa lain tidak mempunyai lahan yang dimiliki oleh desa lain.

Penyebab Pasar Dosan di bangun jauh dari permukiman masyarakat di karenakan tidak ada tempat lain untuk pembangunan pasar. Guna membangun pasar dosan tersebut agar supaya masyarakat yang ada di Kecamatan Pusako mau berbelanja di pasar dosan. tetapi letak pasar yang tidak strategis itu menyebabkan masyarakat enggan untuk berbelanja. Kurangnya para pedagang menyebabkan tidak maksimal nya redistribusi tersebut di karenakan letak lokasi pasar tidak strategis dari pemukiman warga. sehingga tidak adanya pendapatan yang di dapat oleh pedagang pasar tersebut dan penurunan pendapatan redistribusi.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 193 tahun 2017 tentang pengelolaan pasar tradisional menjelaskan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pasar tradisional.

Sistem pengelolaan pasar tradisional yaitu penataan pasar meliputi pemeliharaan pasar, peningkatan kebersihan pasar, peningkatan pedagang pasar, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar dan peningkatan fasilitas pasar. Sistem pemberdayaan pasar meliputi peningkatan profesional pengelola, peningkatan kompetensi pedagang, peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Tetapi pada kenyataannya pasar tradisional yang didirikan di Desa Dosan tidak sesuai dengan perencanaan dimana perencanaan yang di buat oleh Kepala Desa dan di setuju oleh kepala daerah tidak Efektif, karena dalam mendirikan pasar tersebut tidak melihat letak lokasi yang sebenarnya, sebagaimana di jelaskan pasal 6 ayat 1 di atas. Dimana penentuan lokasi itu sangat penting , jika lokasi nya jauh dari pemukiman masyarakat maka masyarakat engan untuk berbelanja di pasar tersebut. Tata letak pasar harus di perhatikan sebaik baik supaya pasar yang di bangun tidak sia- sia dan bisa di pergunakan semestinya.

Adapun upaya UPTD dalam pelaksanaan pembangunan pasar desa Dosan di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak :

1. Pembuatan tempat parkir

Dalam hal ini pihak UPTD berusaha membuat tempat parkir agar masyarakat yang datang ke Pasar Tanjung Medan bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi dan tidak ada lagi yang parkir sembarangan.

2. Perbaiki jalan menuju pasar

Jalan adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pengguna pasar. Masih banyak jalan yang belum diaspal, berkerikil, dan jalan yang berlobang menuju area pasar. Maka dari itu pihak UPTD berupaya untuk memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat mudah berkendara menuju pasar.

3. Menghimbau masyarakat Kecamatan Pusako agar berbelanja di Pasar Tanjung Medan

Dengan adanya partisipasi masyarakat setempat pasar akan mudah untuk berkembang dan beroperasi dengan baik. Selain itu masing-masing kepala desa yang terdapat di Kecamatan Pusako agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk berbelanja di pasar Tanjung Medan.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan beberapa fenomena yaitu:

1. Letak lokasi pasar yang tidak strategis dan terlalu jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut.
2. Kurangnya fasilitas umum yang tidak mendukung kegiatan pasar. Seperti kurangnya kios, dan tidak adanya area parkir.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelesan fenomena dan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini perlu menetapkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 tahun 2017 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja UPTD pengelolaan Pasar Kabupaten Siak” (studi kasus di Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis dan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 tahun 2017 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (studi kasus di Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan kondisi pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa diharapkan dari Penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi , minimal dapat memperkaya investasi hasil- hasil penelitian di bidang administrasi khususnya dibidang administrasi Negara atau Administrasi Publik.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menambah wawasan penulisa pembaca tentang judul Implementasi peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- c. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa Administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari ad dan ministrare, yang bearti “membantu, melayani, atau memenuhi serta” administration yang bearti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan,serta pengelolaan.

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam stuktur dengan mendayagunakan sumberdaya- sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efesiensi Organisasi.

Pasalog (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerja terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (syafiie, inu kencana; dkk. 1999) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat moderen . eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahuinya adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Sedangkan Menurut The Liang Gie menyatakan bahwa Administrasi segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut George. J Gordon (dalam syafie 2003;33) Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif , eksekutif serta peradilan.

Menurut Soetarto dan R.P Soewarno menyatakan bahwa Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/ kegiatan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut Jhon M priffner dan Robert V Preshus (1960:4) mendefenisikan administrasi publik adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah di tetapkan oleh badan – badan perwakilan politik.

2. Koordinasi usaha- usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan melaksanakan kebijakan- kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan teknik- teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Harbani Pasalong mendefenisikan administrasi :

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan diantara mereka.
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan arenanya merupakan sebagian dari proses politik,
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagi macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membukakan mata kita untuk lebih melihat terdapat administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik- mengetik, surat, catat mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika di perhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat

sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain:

- a. *Man*, yaitu manusia dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang di maksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. *Method*, yaitu Metode atau cara.cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat – perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaraan pergerakan sebuah organisasi dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif, efesien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau Alat ini akan berfungsi sebagai sesuatu yang akan di olah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang di peroleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.

f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi publik, market akan teralisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar- benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Konsep 6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah- tengah birokrasi pemerintah secara menyeluruh maupun pemerintah.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur- unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur – unsur tersebut. Tujuan yang telah di tetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi.

Organisasi merupakan titik sentral dari tujuan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasional.

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendri Andry 2015;14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta

formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya bantuan dari orang yang mau terlibat didalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur- unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:73) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syaie, 1999;53) organisasi sebagai suatu alat saling hubungan satuan- satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang – orang yang di tempatkan kedalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Dari definisi- definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan antara lain yaitu:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar- individu maupun kelompok baiklah dalam organisasi itu sendiri maupun keluar.
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing- masing.

Menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur- unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur- unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah:

1. Manusia, yaitu : yaitu terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiannya, menjaalan kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiannya maupun secara berkelanjutan untuk memnuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Secara sederhana organisasi mempunyai tiga unsur, yaitu ada orang- orang ada kerja sama, dan tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri- sendiri. Akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar orang- orang didalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan bersama maka di perlukan daya kerja. Daya kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu daya manusia dan daya bukan manusia.

1. Daya Manusia

Daya manusia terdiri dari kemampuan dan kemampuan , meliputi:

- a. Kemampuan dan kemampuan untuk bekerja atau berbuat.
- b. Kemampuan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan
- c. Kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakan prinsip- prinsip organisasi

2. Daya Bukan Manusia

Daya bukan manusia daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, benda; misalnya mesin- mesin , uang, waktu, metode dan dari sumber daya alam lainnya (iklim, udara, cuaca, air dan sebagainya.)

Dari berbagai pengertian organisasi dapat dijelaskan bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, ia harus ada intraksi didalam dan di luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari- hari dengan saling mendukung antara satu sama lainnya, baik antara orang- orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain untuk instansi lain yang berada diluarnya.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk memepertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.

Menurut Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.(dalam Zulkifli, 2015;5) dari poin-poin diatas barulah diketahui bahwasannya sangat pentingnya manajemen, baik dari awal pelaksanaan manajemen tersebut hingga hasil akhir dari manajemen tersebut.

Kemudian menurut Sondang P.Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Frans sadikin (dalam Samsudin, 2010 :18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan menoprasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi,dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman,dan penggerakan bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Menurut Hebert A. Simon organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain-lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Simon, 1958).

Menurut Chester L. Bernard organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (Bernad, 1958).

Menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pasa suatu sistem (Waldo, 1955).

Menurut Luther Gulick organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang diberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan (Luther Gulick dalam Sutarto, 1995).

Dari definisi- definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan antara lain yaitu:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar.
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Dari defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa maanjemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebutkan manajemen sebagai “seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan.ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk mempraktekan. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Menurut Goorge R. Terry dalam Zulkifli (2009;16) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan–tindakan *planning, organizing, dan controlling* dimana pada masing- masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara bertututan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telaah ditetapkan sebelumnya.

Secara ekspelesit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam Zulkifli,

(2009;16) menurut manajemen suatu sub konsep atas pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang- orang dan pengarahannya fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar- benar tercapai. Manajemen sebagai proses memiliki enam fungsi utama yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahannya, pengkoordinasian, pengontrolan dan penyempurnaan.

- a. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal- hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara- cara mengerjakannya.
- b. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
- c. Pengarahannya adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, petunjuk, mendorong semangat kerja, agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
- d. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang- orang dan tugas- tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap, serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaraban, dan kekosongan tindakan.
- e. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap seni penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut:

- Manajemen dibutuhkan tujuan pribadi, kelompok, organisasi ,tau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan-tujuan,sasaran- sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak- pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan , seperti pengusaha dan karyawan , kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dan pemerintah.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efesiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

4. Konsep Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan atau perumusan keputusan. Dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi.implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *polici markes* untuk mempengaruhi prilaku birokrat pelaksana agarterseada memberikan pelayanan dan mengatur prilkau kelompok sasaran.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang dimiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto,2005:44). Lebih lanjut

dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan dan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/ kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan Publik biasanya bukan lah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu , kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Selanjutnya Anderson (1984:113) mengklasifikasi kebijakan ,policy menjadi dua: substantif dan procedural. Kebijakan subsntatif yaitu apa yang harus di kerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu sipapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini bearti, kebijakan publik adalah kebijakan- kebijakan yang di kembangkan oleh badan- badan dan pejabat- pejabat pemerintah.

Menurut Harbani pasolong (2007:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang di gunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat,yang akan di jadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Denifisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa

1. Kebijakan publik di buat oleh pemerintah yang berupa tindakan- tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif demi kepentingan publik

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif – alternatif merupakan penilaian- penilaian yang di peroleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan saran keputusan menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/ instansi tersebut bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.
5. **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik (inggris, *public policy*) adalah keputusan- keputusan yang meningkat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah di buat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak , umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab- sebab , konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum menggunakan dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan (sofyan effendi).

Banyak dari para ahli dan penulis menawarkan tentang Defenisi Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam subarsono (2011:2) tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintahan, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintahan. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2012:44), mengatakan untuk memahami sebagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (lihat tindakan pemerintah yang berwenang). Kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis financial untuk melakukannya.

1. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
2. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
3. sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat di pecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

6. Konsep Implementasi

Menurut Mazmanian (dalam Wahab 2005:68) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan- keputusan eksekutif. Lebih lanjut Nugroho (2014:657) mengatakan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung menimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kemudian Menurut Harsono (dalam Nugroho 2004:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sementara itu menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008:447) mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilkauan oleh individu-individu (atau kelompok- kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Menurut Edward III (dalam Awing, 2010;31) implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanaan dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja

birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. komunikasi berkenan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan / atau publik , ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan , sikap, dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasi secara jelas konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implemntor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya , kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen , kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif

yang berbeda dengan pembuatan kebijakan , maka proses implementasi kebijakan juga mnejadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implemantor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akancenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing- leading- controlling. Jika ketika kebijakan sudah di buat maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan , melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan suatu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan mikro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha- usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan , pemerintah desa. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

7. Konsep Pasar

Menurut Ari Sudarman (2004:7), pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Didalam bahasa sehari- hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis.

Menurut Philip Kotler dan Gray amstrong mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada orang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.

Menurut Hendri Ma'aruf mendefenisikan bahwa pasar adalah memiliki tiga pengertian yaitu pasar dalam arti “tempat” yaitu tempat bertemunya para

penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti” interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya intraksi jual beli. Pasar dalam arti sekelompok anggota nya masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli”. Pengertian ini merujuk pada dua hal , yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang- orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Menurut Kasmir mendefenisikan Pasar Tradisional adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Undang-Undang pasar rakyat/ tradisional adalah tempat atau usaha yang di tata, di bangun, di kelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, swasta Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadya masyarakat/ koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agarmemudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Ciri-ciri Pasar Tradisional

Ada beberapa ciri-ciri khusus mengenai pasar tradisional, dan ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
2. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
3. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang di ambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau negara.
4. letaknya yang strategis, dimana sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontang kepada penjual.
6. Penataan barang-barang yang dijual masih kurang rapi dan sedikit berantakan.

Pasar Modern ialah pasar yang mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Karena itu, ada ciri-ciri mengenai pasar swalayan atau pasar modern yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.

2. Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
3. Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
4. Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hati sendiri.
5. Selain itu, dikenal konsep self service yang biasa di sebutkan swalayan dengan manajemen harga mati. Di Pasar Swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil barang- barang yang hendak dibeli dan dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.
6. Tempat barcode di setiap barang . barcode adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan pembeli.
7. Pelayan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Barang-barang yang di ambil atau yang hendak dibeli dihitung di kasir.
8. Pembayaran yang praktis, ada yang membayar dengan uang dan ada juga yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Jadi seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak yang dapat menimbulkan banyak masalah, misal pencopetan, penjabretan. (sumber jurnal Manajemen dan Bisnis–universitas muhammadiyah Sumatra utara, vol.13 no.1, 2014, hal 19).

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor . 11 tahun 2017 Bab 1 pasal 1 di dalam ketentuan umum menyatakan ayat(6)sampai ayat (8)

Ayat 6 menyatakan Pasar adalah area tempat jual beli barandan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang di sebut sebagaipasar rakyat maupun pasar swalayan dan atau pun pusat perbelanjaan , pertokoan, perdagangan maupun sebaliknya.

Ayat 7 Pasar Rakyat adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Ayat 8 Pasar Rakyat adalah yang dikelola oleh pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/ atau pemerintah Provinsi dan /atau pemerintah Daerah yang di kelola oleh Pemerintah Daerah , yang berupa toko, kios, los, dan tenda yang dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Pasal 6

1. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi
 - b. Penyediaan Fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. Sarana pendukung.
2. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
3. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c berlaku untuk rehabilitas pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Mengacu pada rencana tata ruang termasuk peraturan zonasi daerah;

- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota dan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 9

Fasilitas bangunan dan taat letak pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. Bangunan toko/ kios/ los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara cukup.
- d. Penataan toko /kios/ los berdasarkan jenis barang dagangan
- e. Bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah
- f. Toilet umum/ mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih
- g. Kantor pengelola
- h. Areal parkir
- i. Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelola sampah sesuai standar yang berlaku.
- j. Sanitasi/ drainase
- k. Tempat ibadah
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas
- m. Sarana keamanan dan pengamanan
- n. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran dan
- o. Tempat peneglolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. Kemetrologian / penerapan
- b. Sarana komunikasi
- c. Area bongkar muat dagangan
- d. Ruang terbuka hijau
- e. Ruang penitipan anak dan ibu menyusui dan
- f. Alat transportasi / tetangga / escalator/ lift

pasal 11

1. Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan
2. Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain:
 - a. Sistem penarikan restribusi
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampa
 - d. Sistem perpajakan
 - e. Tem pemeliharaan sarana pasar
 - f. Sistem kemetrologi / penteraan dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 12

1. Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pemberdaya Pasar Rakyat.
2. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Meningkatkan profesionalisme pengelola

- b. Meningkatkan kompetensipedagang pasar.
- c. Meningkatkan kualitas dan membenahan sarana fisik pasas
- d. Memberikan bantuan promosi dan pemasaran
- e. Peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat
- f. Pengembangan pasar rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya dan
- g. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan dan kepentingan para pedagang.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dalam perkada.

Pasal 13

1. Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan Pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
2. Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh taat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat
 - d. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat
 - e. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat pada tingkat nasiona
 - f. Pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat

- g. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat dan
- h. Pemantauan dan evaluasi melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

8. Konsep Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam Saifuddin (2014:53), pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran- sasaran telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber- sumber lain.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi- fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:55) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan

pengawasan dan penilaian. Kemudian pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan.

Follet (2007:78) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. (sumber <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/> pengertian pengelolaan menurut para ahli).

Menurut Wardoyo (1980:41) mendefinisikan Pengelolaan adalah sesuatu rangkaian kegiatan yang berintikan , perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.sama halnya dengan Harsyono yang mengatakan (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata ‘kelola ‘ mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi pasar pedagang kaki lima , pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

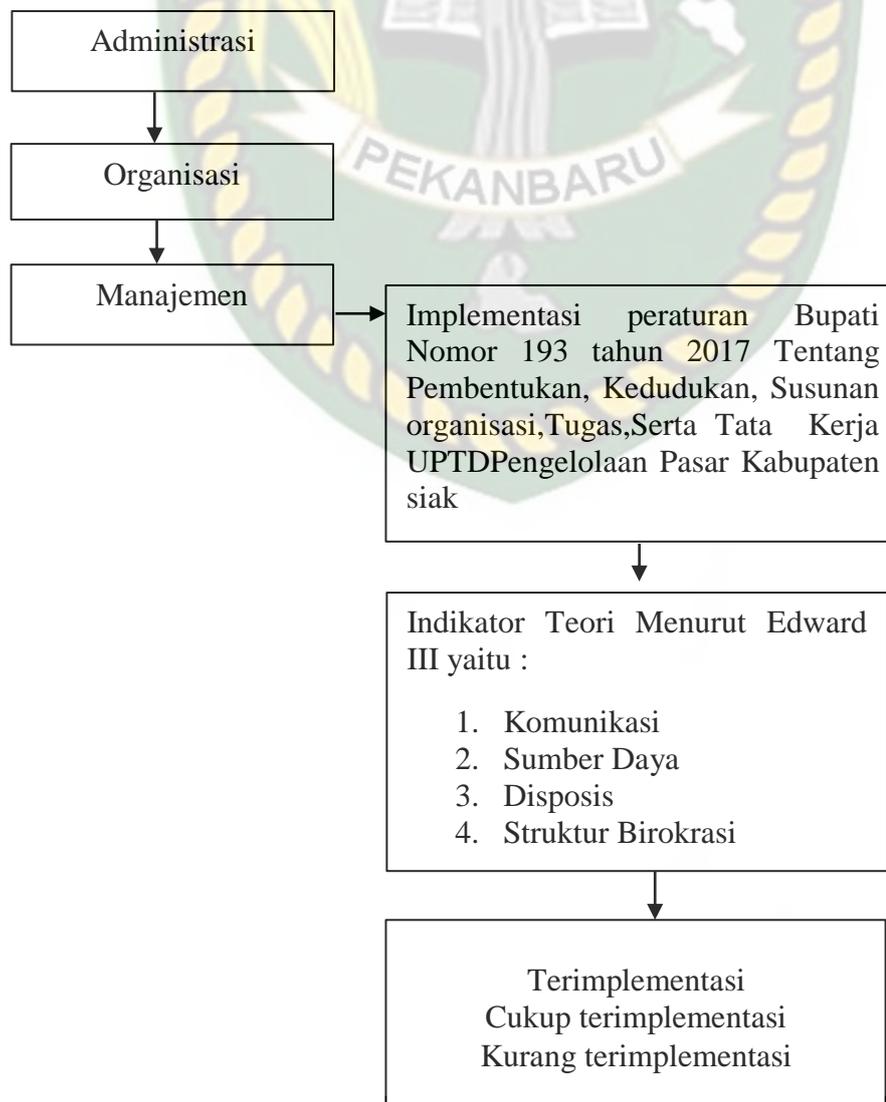
Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalia pasar tradisional.

Arikunto (1993:31) mendefinisikan bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian.

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran Penelitian Tentang Implementasi peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(studi kasus di pasar tanjung medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut : Implementasi peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak belum teratasi dengan baik.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka penelitian memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dan keputusan keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

3. Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dan semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, di perlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.
4. Kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum menggunakan dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan (sofyan effendi).
5. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung menimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan publik tersebut.
6. Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Didalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis.
7. Pengelolaan Pasar adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.
8. Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang di

maksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Dinas pengelolaan pasar Kabupaten siak.

9. Sumber daya adalah pelaksanaan atau implementor yang di arahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.
10. Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi dan untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Struktur birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tetap untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep- konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang nama sebagai variabel penelitian adalah” Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis

Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(studi kasus di pasar tanjung medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak) yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2: Operasional variabel Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(studi kasus di pasar tanjung medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Pengukuran
Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2009:149) menamakan model implementasi kebijakan publiknya istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan diteoreman oleh Edward III, yang terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Implementasi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(studi kasus di pasar tanjung medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).	1. Komunikasi	a. Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. b. Menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media tertentu	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
		2.Sumber Daya	a. Memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan pasar b. Sudah melaksanakan pengelolaan pasar berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksi masing-masing	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
		3. Disposisi	a. Sikap dinas Perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas pengelolaan pasar	Terimplementasi Cukup terimplementasi

			b. Tidak pernah menerima perlakuan / sikap yang kurang enak dari dinas perdagangan dan perindustrian.	Kurang terimplementasi
		4. Struktur Birokrasi	a. Melakukan SOP b. Melaksanakan pragmentasi/ sudah bertanggung jawab dengan tugas masing-masing	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi

Dokumen ini adalah Arsip Mhik :

F. Teknik pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasi dalam 3 (tiga katagori) yaitu: Terimplementasi (3 skor), Cukup Terimplementasi (2skor), dan yang terakhir adalah Kurang Terimplementasi (1 skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan katagori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang katagori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini:

➤ Ukuran Variabel

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilian terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata KerjaUnit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak berada pada skala 0-33%

➤ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 0-33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 0-33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 0-33%

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif , dengan menggunakan metode kuantitatif . yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/ kuisioner. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009:72). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mmengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*natural setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Tanjung Medan di Desa Dosan Kecamatan Pusako. Adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 193 tahun 2017 Tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak,khususnya di Kecamatan Pusako pasar induk belum terlaksana dengan baik. Selain itu,letak lokasi pasar kurang strategis sehingga kurangnya minat

masyarakat untuk berbelanja dipasar tersebut. Selain itu, Kecamatan Pusako memiliki 5 pasar salah satunya pasar Tanjung Medan. alasan saya memilih Lokasi pasar Tanjung medan karena Pedagang dan pembelinya sedikit sehingga saya tertarik untuk meneliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:73) populasi dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kepala Pengelolaan pasar Tanjung Medan Desa Dosan, dan Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2009:73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 orang.

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Serta Tata Kerja Unit pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(Studi Kasus di pasar tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak).

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Kecamatan Pusako	1	1	100%
2	Kepala UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak	1	1	100%
3	Kepala Pengelolaan Pasar Tanjung Medan Desa Dosan	1	1	100%
4	Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako	30	20	66%
5	Masyarakat Desa Dosan Kecamatan Pusako	3	3	100%
	Jumlah	36	26	66%

Sumber Data: Modifikasi penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek, memungkinkan untuk menggeneralisasi karakteristik elemen populasi. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Arikunto, 2010; Sularso, 2003) Sampling berkenan dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan- keterangan dan data yang di perlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai Ketua UPTD dinas perdagangan dan perindustrian, kepala Bapak Camat Pusako dan Kepala pengelolaan Pasar. Sehingga di peroleh data , informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dan organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Kepala UPTD Dinas Pasar Perdagangan dan Perindustrian. Data Sekunder ini diperoleh dari Kepala UPTD dinas pasar Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh sekretaris dinas Pasar Siak seperti Arsip literatur, Documen, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ ditempelkan di papan/ dinding informasi di Kantor dinas Pengelolaan Pasar Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek peneliti.

b. Kuisoner / Angket

Kuisoner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati,2007:64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisoner.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara di gunakan bila ingin mengetahui hal- hal dari responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku- buku yang relevan, peraturan- peraturan, laporan kegiatan, foto- foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar,atau karya – karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada

dilapangan penelitian. Selanjutnya data yang didapatkan, dikumpulkan dan diklarifikasikan melalui kuisioner menurut jenisnya kemudian di olah kedalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pemahasan sekaligus penguji hipotesis.

Teknis analisi data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampling atau rumus slovin.

$n =$

keterangan:

n: sampel

N: populasi

E: besarnya tingkat kesalahan

I: konstan



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30'' - 00 20' 49'' lintang selatan dan 100 54' 21'' - 102 10' 59'' bujur timur secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) indonesia- Malaysia- Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa- rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25- 32 celcius, dengan kelembaban dan curah cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai siak yang membelah wilayah kabupaten siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai siak, karena morfologinya relative datar. Selain sungai siak, daerah ini juga dialiri sungai- sungai lain, yaitu sungai Mandau,

sungai gasib, sungai apit, sungai tengah, sungai rawa, sungai buatan, sungai limau, dan sungai bayam. Sedangkan danau- danau yang tersebar didaerah ini adalah danau ketialau, danau air hitam. Danau besi, danau tembatu songsang, danau pulau besar, danau zamrud, danau pulau bawah, danau pulau atas, dan tasik rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% sirplus air dan curah hujan rata- rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan- bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan oktober hingga desember, sedangkan bulan kering pada bulan juni hingga agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi kearah pengunungan bukit barisan di bagian barat wilayah provinsi Riau.

B. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik pong, dengan pusat kerajaan berada di buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh- tumbuhan yaitu siak- siak yang terdapat disitu. Sebelum kerajaan siak berdiri, daerah siak berada dibawah kekuasaan johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal pemekaran Kabupaten Siak memiliki Delapan kecamatan dan sekarang sudah 14 kecamatan. Pada awal Kabupaten Siak berdiri sebagai Kabupaten Kantor – kantor pemerintah hanya menumpang, menyewa rumah penduduk, dan ruko- ruko yang dijadikan tempat pelayanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kabupaten siak yang signifikan, kini semua kantor pemerintah sudah mempunyai kantor sendiri dan berdiri megah yang dinamakan kompleks perkantoran Tanjung Agung.

Diawali pemerintah Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi kecamatan Siak.Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri indrapura berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara Administrasi batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan kota Pekanbaru.
- c. Sebelah timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru.

C. Profil Desa Desa Dosan Kecamatan Pusako

Sejarah berdirinya Desa Dosan tidak diketahui tahun pastinya, dari keterangan masyarakat didapat informasi bahwa Desa Dosan sudah ada sejak masa kerajaan Siak Sri Indrapura dan atau masa penjajahan Kolonial Belanda.

Menurut legendanya, asal mula penduduk Dosan berasal dari suku Mandau yang merantau, dimana pada tahun 1930-an pendatang dari Mandau hijrah ke Dosan untuk berladang ditepian sungai. Pada saat itu di temukan banyak pohon ataupun tanaman buah-buahan seperti pohon durian, duku dan lain sebagainya,. Pada masa itu desa ini diberi nama sungai Dusun karena berada ditepian sungai.

Awalnya Desa Dosan hanya dihuni oleh tiga KK Kepala Keluarga (KK). Mata pencariannya pada saat itu adalah pemanfaatan hasil hutan seperti rotan, dammar, buah- buahan serta mencari ikan dan berladang dengan sistem berladang berpindah- pindah.setelah sekian lama berkembang datanglah perantau dari Kampar yang diketahui oleh Buyung Hitam. Pekerjaan mereka pada saat itu adalah pembawa karet, kopi ke Singapura dan Malaysia, mereka biasa menyebutnya “ Smokel”.

Profil Desa Dosan:

1. Jumlah penduduk Desa Dosan Sekarang sekitar 1.327 orang yaitu sekitar 366 KK
2. Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Dosan adalah berkebun, bertani dan nelayan.
3. Luas wilayah sekitar 11.250 Ha

4. Model wilayah nya secara umum berbentuk tanah liat atau mineral
5. Ketinggian daerah 2 meter dari permukaan laut.

Pada tahun 1950-an, Pak Buyung Hitam membuat rumah ditanjung yaitu dari ujung daratan hingga ketengah air, yang apabila diliht dari jauh terlihat indah. Karena belum populernya Desa Sungai Dusun, oleh para pendatang maka terjadi perubahan nama Desa Sungai Dusun menjadi Desa Tanjung Medan.

Penetapan akhir untuk penamaan Desa Dosan yaitu pada saat terbentuknya Kabupaten Siak yang pada itu Tengku Rafi'an sebagai pejabat sementara.karena beliau ingin melastarikan kembali nama- nama sejarah Desa terdahulu, maka terjadi pergantian nama Desa Dosan yang berasal dari Sungai, yang menurut cerita mulanya berasal dari siak kiri yaitu Sei Dosan ditemukan oleh seseorang Hulubalang kerajaan Siak Sri Indrapura yang bernaama Hulubalang Bisai dari Desa Sungai Dusun.

Komposisi etnis di Desa Dosan masih didominasi oleh Melayu, baik itu yang merupakan suku melayu asli atau perantauan dari suku Mandau dan kampar dengan jumlah penduduk saat ini di perkirakan berjumlah 1.327 orang sekitar 366 KK. sejak dahulunya masyarakat Dosan banyak bergantung pada hasil alam baik itu dari sungai siak berupa hasil tangkapan ataupun hasil bertani dan berkebun dengan cara membuka lahan disekitar hutan di wilayah Desa.

Budaya adat melayu masih tetap dipakai dalam proses perkawinan, selain itu juga terdapat kesenian komping maupun rebana. Kearifan lokal dan adat istiadat mengatur mengenai hubungan sosial budaya dan lingkungan, yang mana

pada saat ini adat istiadat diberikan baik untuk acara pernikahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan dan alam sekitar). Desa Dosan merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan pusako. Kecamatan pusako terbentuk pada Tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bungaraya. Kecamatan Pusako terdiri dari beberapa unsur pemerintah antara lain kantor Camat pusako, UPTD Pendidikan, UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang, UPTD pertanian, Puskesmas Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Pusako.

D. Letak Geografis Desa Dosan Kecamatan Pusako

Letak Geografis Desa Dosan Kecamatan Pusako Desa Dosan terletak pada Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dengan Buton, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Benayah, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Limau.

Seperti Desa-Desa lain Kecamatan Pusako, sarana perhubungan Desa Dosan dari dahulu menggunakan sampan atau perahu. Baru tahun 1996 masyarakat Desa Dosan dapat memanfaatkan akses jalan darat secara Orbitasi letak Desa Dosan 2, 5 km dari Ibukota Kecamatan, 26 km dari Ibukota Kabupaten, dan 113 km dari Ibukota Provinsi.

Secara umum tanah di Desa Dosan terbagi dua jenis tanah, dimana di daerah pemukiman cenderung tanah berpasir atau gambut tipis atau biasa di sebut masyarakat dengan nama kilang manis, dengan ketinggian daerah 1-2 meter dari pemukiman laut.

Desa Dosan terletak di kecamatan Pusako, Kecamatan Pusako memiliki luas wilayah Sekitar 220. 448 Ha, dengan pusat pemerintahan terletak dikampung

Dusun Pusako yang berjarak sekitar 35 km dari pusat pemerintah Kabupaten. Kondisi fisik ditinjau dari keadaan topografi wilayah Kecamatan Pusako merupakan dataran rendah, sebagai berupa daerah rawa yang banyak dialir oleh sungai.

Secara garis besar wilayah Kecamatan Pusako terdapat banyak lahan perkebunan yang didominasi oleh perkebunan sawit yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan Daerah dan masyarakat sekitar.

Kecamatan Pusako berbatasan dengan:

- a. Utara : Kecamatan Sabak Auh
- b. Selatan : Kecamatan Mempura
- c. Barat : Kecamatan Bungaraya
- d. Timur : Kecamatan Sungai Apit

E. Gambaran Umum Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

1. Latar Belakang Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terdapat tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Pasar kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang didalamnya termasuk bidang pasar.

2. Visi dan Misi Bidang Pasar Kabupaten Siak.

Visi:

“ Terwujudnya Pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021 ”

Misi:

Dalam rangka mewujudkan Visi Bidang Pasar Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka ditetapkan 2(dua)

Misi yaitu:

- a. Mewujud Pasar yang Aman, Tertib dan Berbudaya
- b. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian
2. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perdagangan dan perindustrian
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perdagangan dan Perindustrian
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenang bidang tugas dan fungsinya.

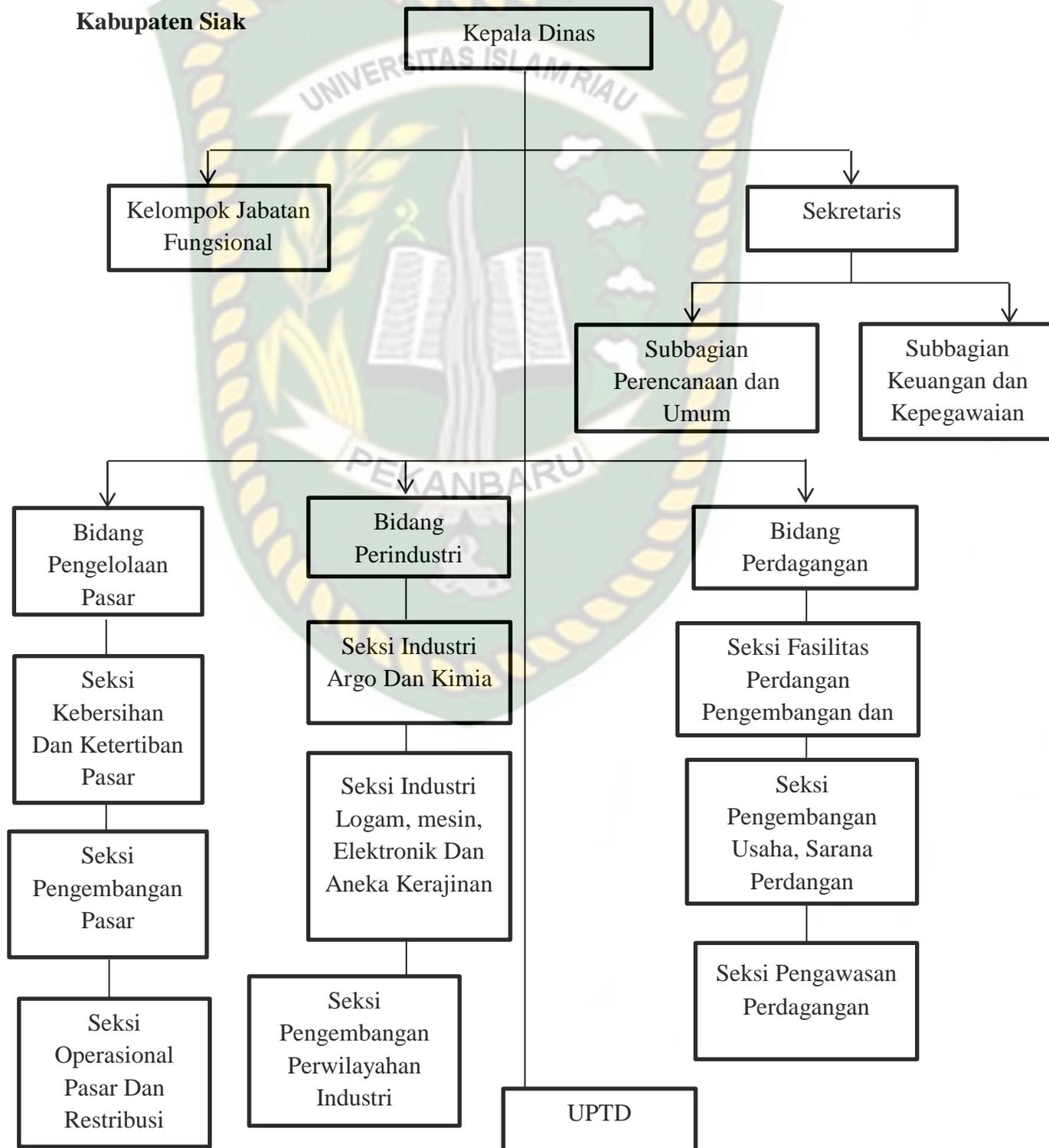
4. Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Untuk melaksanakan tugas pokok sehari- hari, Dinas Perdagangan dan perindustrian kabupaten Siak telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Siak

No.82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Siak



Selain itu Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Siak membawahi 2 (dua) unit pelaksana teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak dan UPTD metrologi legal Kabupaten Siak.

UPTD Pasar Kabupaten Siak membawahi 4 (empat) koordinator pengelolaan pasar, yaitu koordinator pengelolaan pasar wilayah 1 dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako, Sabak auh, Koordinator pengelolaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan kerinci kanan, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Goto gasib, Koordinator pasar wilayah III dengan Kecamatan Sungai Mandau, dan Koordinator Pengelolaan pasar wilayah IV dengan wilayah Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas, sedangkan Pengelolaan Pasar dikecamatan Siak, kecamatan Mempura, Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Dayun langsung Dikoordinir oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.

A. Kepala Dinas

Dinas perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang- bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sasaran prasana, ketenangan, kerumah tangaan dan kelembagaan.

Sekretaris terdiri dari

1) Sub bagian perencanaan dan Umum

Subagian perencanaan dan Umum mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja Subbagian perencanaan dan Umum, melakukan kegiatan surat menyurat, melakukan kearsipan dan ekspedisi, mengelola, perpustakaan, informasi dan dokumen, serta melaksanakan penyusunan bahan rencana Strategis (Renstra)

2) Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian

Sub bagian keuangan dan pegawai mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja subbagian keuangan dan kepegawaian, mengendalikan rencana tahunan, menyiapkan bahan laporan bulanan triwulan dan tahunan, mengumpulkan dan mengelola data laporan hasil kegiatan, membuat daftar gaji dan melaksanakan pengajian, serta melaksanakan perbendaharaan keuangan.

C. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang pengelolaan Pasar, terdiri dari:

- a. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar
 - Seksi Keberhasilan dan ketertiban pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar.
 - Seksi kebersihan dan Ketertiban pasar dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.
- b. Seksi Pengembangan Pasar

- Seksi Pengembangan Pasar mempunyai Tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi pengembangan Pasar.
- Seksi pengembangan pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

c. Seksi operasional Pasar dan Restribusi Pasar

- Seksi Operasional Pasar dan Restribusi Pasar mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memebri petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas

d. Seksi Operasional dan Restribusi Pasar.

Seksi Operasional dan Restribusi pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Perdagangan

a. Seksi Fasilitas perdagangan, pengembangan dan pemasaran.

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan dan pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagai pedoman dLm pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan mootoring dan evaluasi kebijakan perdagangan
- Melaksanakan kegiatan fasilitas pelayanan saran pertimbangan dan b perizinan usaha perdagangan.

b. Seksi pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi.

- Menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan Usaha, sarana perdagangan dan pemantauan Distribusi sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan
- Melaksanakan fasilitas dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

c. Seksi Pengawasan Perdagangan

- Menyusun rencana dan program Kerja Seksi Pengawasan Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pengawasan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri,).
- Melaksanakan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TPD), Tanda Daftar Gudang (TGD), Serta Wajib Daftar perusahaan (WDP).

E. Bidang Perindustrian

a. Seksi Industri Agro dan Kimia

- Menyusun rencana dan program Kerja Seksi Industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.

- Melaksanakan dan Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Agro dan Kimia

- b. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik, Aneka dan Kerajinan.
 - b. Menyusun rencana dan program kerja seksi Industri Logam, Mesin, Eliktronika,Aneka dan Kerajinan.
 - c. Melaksanakan Koordinasikan dan Suvervisi pengembangan Industri Logam, mesin, Elektronika, Aneka dan Kerajinan.
 - d. Melaksanakan dan Penetapan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Industri Logam,Mesin, Elektronika, Aneka Kerajinan.
 - e. Seksi Pengembangan Perwilayah Industri
 - f. Menyusun rencana dan program kerja Seksi pengembanganPerwilayah Industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - g. Melaksanakan Koordinasi, survivisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industry.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak. (Studi Kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak). Penulis mengumpulkan data- data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuisioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat usia

Tingkat Usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berfikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berfikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dapat Dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 :Identitas Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20- 30	10	50%
2	31- 40	5	25%
3	41- 50	5	25%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang berada pada Usia 20-30 berjumlah 10 orang (50%), kemudian responden yang berusia 31- 40 berjumlah 5 orang (25%), dan responden yang berusia 41- 50 berjumlah 5 orang (25%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden Pedagang Pasar Tanjung Medan didominasi oleh tingkat usia 20-30 tahun dengan (50%).

2. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu jenis kelamin Laki- Laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga memengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden Pedagang Pasar tanjung medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V. 2 Identitas Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase
1	Laki- Laki	11	55%
2	Perempuan	9	45%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdiri dari 11 orang jenis kelamin laki- laki (55%) dan 9 orang jenis kelamin perempuan (46%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden Pedagang Pasar Tanjung Medan didominasi oleh jenis kelamin laki- laki dengan persentase 55%.

3. Tingkat pendidikan

Kemudian dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga identitas . identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan pendidikan dapat di lihat tabel sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Responden Pedagang Pasasr Tanjung Medan Desa DosanKecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	3	15%
2	SLTP	9	45%
3	SLTA	8	40%
	Jumlah	20	100%

Data Olahan Hasil Penelitian tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden Pasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdiri dari 9 orang memiliki tingkat pendidikan SLTP (45%) Jumlah Tertinggi dan tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang (15%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa didominasi oleh tingkat Pendidikan SLTP dengan persentase (45%).

B. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Sertab Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.(Studi kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak)

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Sertab Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Sertab Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam Menyampaikan sebuah pesan atau informasi.Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada

pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Komunikasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu penyampaian informasi dengan jelas dan akurat tentang pengelolaan Pasar Tanjung Medan, mendapatkan informasi tentang pengelolaan pasar melalui media maupun secara langsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan mengenai indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat	16 (80%)	1 (1%)	3 (1%)	20
2	Menyampaikan pesan oleh seseorang melalui media tertentu	14 (70%)	-	6 (30%)	20
	Jumlah	30	1	9	40
	Rata-rata	15	1	4	20
	Persentase	75%	1%	20%	100%

Sumber Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V. 4 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator komunikasi terdapat dua Item penilaian, yang pertama menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat jawaban responden yang berada pada katagori Terimplementasi berjumlah 16 orang, sedangkan berada pada katagori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang dan yang berada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang. Bearti sebagian besar responden yaitu pedagang Pasar Tanjung Medan menilai bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyampaikan informasi.selanjutnya untuk item penilaian menyampaikan pesan melalui media tertentu dimana jawaban responden Pedagang Pasar Tanjung Medan yang berada katagori Terimplementasi 14 orang.sedangkan katagori Cukup Terimplementasi tidak ada dan pada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang. Bearti penilaian pedagang pasar Tanjung Medan terhadap item yang di nilai menyampaikan pesan melalui media tertentu ini menunjukkan termasuk interval Terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak, Bapak Hendryco, S.sos mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan Pertama Bagaimana cara Bapak menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat dengan petugas pengelolaan pasar desa Dosan? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah Bapak sering menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan petugas pengelola pasar Tanjung Medan? Beliau Menjawab:

“Saya sering menyampaikan informasi dan berkomunikasi kepada petugas pengelolaan pasar secara langsung, contohnya pada saat pertemuan rapat. Dan juga secara tidak langsung melalui media onlinen juga aktif. Dan kita juga

memberikan laporan kepada petugas pasar itu biasanya melalui broadcast whatsapp.

(Wawancara : Senin 3 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibuk Nindi mengenai indikator komunikasi dengan pertanyaan pertama dari segi Komunikasi apakah pengelola pasar yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Siak sudah baik? pertanyaan kedua bagaimana cara ibuk menyampaikan informasi tentang redistribusi baik dari penerimaan maupun penyaluran kepada petugas pasar? Kemudian pertanyaan ketiga apakah ibuk sering menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan pengelola pasar atau petugas redistribusi pasar? Beliau menjawab:

“Komunikasinya sudah baik. Saya sudah menyampaikan informasi kepada petugas pasar mengenai redistribusi secara langsung. Dan saya sudah mencantumkan dipapan informasi tersebut.tetapi masih banyak kendala tentang penarikan redistribusi di pasar tanjung medan karena pedagang pasar tanjung medan yang sedikit sehingga hasil redistribusi nya menurun”.

(Wawancara: selasa 4 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi secara keseluruhan sudah menyampaikan informasi dengan baik. Meskipun ada yang tidak secara langsung tatap muka tetapi informasi tersebut bs melalui dalam bentuk surat edaran dan melalui broadcast whasapp.

Berdasarkan hasil observasi untuk indikator Komunikasi peneliti telah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan informasi. Peneliti mendapatkan informasi bahwasanya kepala UPTD pengelolaan pasar sudah memberikan informasi kepada petugas pengelolaan pasar secara langsung, dalam pertemuan acara rapat bulanan. Tetapi ada juga secara tidak langsung melalui media onlinen yang aktif. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan, yang dalam hal ini adalah implementasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Sumber Daya yang terdiri dari dua item penilaian yaitu sarana/ prasarana dalam pengelolaan pasar sudah lengkap,sudah melaksanakan pengelolaan pasar sesuai tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5. Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	sarana/ prasarana dalam pengelolaan pasar sudah lengkap	8 (40%)	10 (50%)	2 (10%)	20
2	Sudah melaksanakan pengelolaan Pasar berdasarkan Tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut	6 (30%)	12 (60%)	2 (10%)	20
	Jumlah	14	22	4	40
	Rata-rata	7	11	2	20
	Persentase	35%	55%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V. 5 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Sumber Daya terdapat dua item penilaian yang pertama sarana/ prasarana dalam pengelolaan

pasar sudah lengkap, jawaban responden yang berada pada katagori Terimplementasi berjumlah 8 orang, sedangkan berada pada katagori Cukup Terimplementasi berjumlah 10 orang dan yang berada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang. Bearti sebagian besar responden yaitu pedagang Pasar Tanjung Medan menilai bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian cukup terimplementasi. Sudah melaksanakan pengelolaan Pasar berdasarkan Tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut, selanjutnya untuk item penilaian tertentu dimana jawaban responden Pedagang Pasar Tanjung Medan yang berada katagori Terimplementasi 6 orang, sedangkan katagori Cukup Terimplementasi 12 orang dan pada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang. Bearti penilaian pedagang pasar Tanjung Medan terhadap item yang di nilai sudah melaksanakan pengelolaan pasar berdasarkan Tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut ini menunjukkan termasuk interval Cukup Terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak, Bapak Hendryco, S.sos mengenai indikator Sumber Daya, bahwa beliau menjawab:

“Fasilitas belum memadai seperti yang diinginkan oleh masyarakat, alasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat apalagi musim kemarau itu sangat amat berdebu” fasilitas yang dimaksud seperti kios nya belum ada, penataan kiosnya berdasarkan jenis barang belum selesai, areal parkir masih berantakan, toilet umum masih dalam tahap pembuatan. Pembelinya sangat sedikit jadi akibatnya pedagang pun rugi karena kekurangan pembeli. awalnya

pedagangnya banyak tapi karena pembelinya kurang pedagangpun makin lama makin berkurang. Palingan ada lah 10 pedagang yang berjualan ditempat tersebut”.

(Wawancara 5 Agustus 2020 Pukul 14. 00 WIB)

Tempat sarana dan prasarana seperti kantor pengelola, areal parkir tempat pembuangan sampah sementara, air bersih, toilet umum, sarana komunikasi fasilitas pemadam kebakaran belum memadai. Belum ada sarana pendukung dipasar tersebut.masih banyak kekurangan sarana pendukung diPasar Tanjung Medan Desa Dosan Kecamatan Pusako.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Afni selaku masyarakat desa Dosan Kecamatan pusako mengenai Sumber Daya beliau menjawab?

“Sarana pendukung belum memadai, sarana yang masih belum dibuat. Kios tempatnya belum tertata rapi, karena banyak yang kosong maka nya jadi bercampur campur tempatnya, jadi kami mohon kepada Pak Camat supaya masyarakat diarahkan untuk berbelanja di Pasar Tanjung Medan Desa Dosan agar pembangunan pasar yang di buat untuk dijadikan pasar kecamatan tidak Sia- sia. Karena pasar yang ada di Desa Dosan adalah pasar Kecamatan”

(Wawancara 6 Agustus 2020 Pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk yeni seorang pedagang Pasar Tanjung Medan yang ada diDesa Dosan menyatakan:

“Sarana dan Prasarana belum memadai karena banyak infrastruktur yang masih kurang, tapi saya harap pasar untuk kedepan nya akan berkembang karena

pasar adalah salah satu pusat ekonomi masyarakat , saya bisa katakan pasar itu adalah jantungnya masyarakat”.

(Wawancara 6 Agustus 2020 Pukul 10 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sangat mendukung untuk pembangunan pasar, dimana sarana dan prasarana tersebut bagaimana mereka mau berbelanja disana kalau tempat nya kurang memadai. Jadi mengenai indikator Sumber Daya adalah “Cukup Terimplementasi”.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksanaan yang berkenan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini adalah disposisi dalam mengimplementasikan pengelola pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Disposisi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu pertama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sudah melaksanakan tugas pengelolaan pasar dengan baik, tidak pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pengelola pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan
Desa Dosan mengenai indikator Disposisi terhadap Implementasi
Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta
Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sudah melaksanakan tugas pengelolaan pasar dengan baik	6 (30%)	5 (25%)	9 (45%)	20
2	Tidak pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pengelolaan pasar	–	–	20 (100%)	20
	Jumlah	6	5	29	40
	Rata-rata	3	2,5	14,5	20
	Persentase	15%	12,5%	72,5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V. 6 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Disposisi terdapat dua item penilaian yang pertama Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sudah melaksanakan tugas pengelolaan pasar dengan baik , jawaban responden yang berada pada katagori Terimplementasi berjumlah 6 orang, sedangkan berada pada katagori Cukup Terimplementasi berjumlah 5 orang dan yang berada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 9 orang. Bearti sebagian besar responden yaitu pedagang Pasar Tanjung Medan menilai Kurang terimplementasi.Selanjutnya Tidak pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pengelolaan pasardimana jawaban responden Pedagang Pasar Tanjung Medan yang berada katagori Terimplementasi tidak ada. sedangkan katagori Cukup Terimplementasi tidak ada dan pada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 20 orang. Bearti penilaian pedagang pasar Tanjung Medan terhadap item yang di nilai Tidak pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pengelolaan pasar tersebut ini menunjukkan termasuk interval “Kurang Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hendryco, S.sos mengenai indikator Disposisi beliau menjawab.

“Dari sejauh ini pengelolaan pasar Tanjung Medan masih kurang baik dalam melaksanakan tugasnya, karena petugas pengelolaan pasar masih lambat dalam melakukan kegiatan tersebut seperti kegiatan kebersihan, apalagi sisa sampah dari pedagang yang berjualan di sore hari. dan petugas pasar pun jarang turun kelapangan karena pedagang yang berjualan sedikit palingan petugar redistribusi untuk memungut biaya tersebut. akan tetapi petugas pasar berusaha

sebaik mungkin supaya Pasar Tanjung medan bisa berkembang lagi dan pedagang sama pengunjung berharap semoga masyarakat Kecamatan pusako mau berbelanja di Pasarr Tanjung Medan.selama ini petugas pasar maupun pedagang dan pengunjung sudah melayani sebaik mungkin belum pernah ada sikap atau tindakan yang kurang enak dari petugas pengelola pasar tersebut”.

(Wawancara 6 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disposisi secara keseluruhan sudah melaksanakan tugas pengelolaan pasar, akan tetapi belum optimal dalam melakukan pekerjaannya.dan belum pernah selama ini menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pasar.

Berdasarkan observasi untuk indikator Disposisi peneliti ini melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan informasi. Peneliti mendapatkan informasi bahwasanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melaksanakan tugasnya akan tetapi masih belum optimal dalam melaksanakan pekerjaannya.dan belum pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pasar tersebut.sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Disposisi “Kurang Terimplementasi”

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah pelaksana atau bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.salah satu aspek struktur yang penting dan setiap organisasi adalah prosedur operasional yang standar (Standar Operating Procedures Atau Sop)

Berikut ini adalah tanggapan responden pegawai terhadap Indikator Struktur Birokrasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Struktur Birokrasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu pertama apakah dalam pelaksanaan pengelolaan pasar sudah menetapkan SOP pasar dengan baik, apakah petugas pengelolaan pasar sudah bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Desa Dosan mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan pasar sudah menetapkan SOP pasar dengan baik	7 (35%)	–	13 (65%)	20

2	Apakah tugas pengelolaan pasars sudah bertanggung jawab dengan tugas nya masing- masing	13 (65%)	7 (35%)	–	20
	Jumlah	20	7	13	40
	Rata-rata	10	3,5	6,5	20
	Persentase	1%	35%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap indikator Struktur Birokrasi yang terdapat 2 item penilaian yang pertama menetapkan Sop, jawaban responden yang berada pada katagori Terimplementasi berjumlah 7 orang, sedangkan berada pada katagori cukup terimplementasi tidak ada dan berada katagori Kurang Terimplementasi berjumlah 13 orang. Bearti sebagian besar responden pedagang pasars Tanjung Medan bernilai Kurang Terimplementasi.selanjutnya tanggung jawab tugas pengelolaan pasar dimana jawaban responden Pedagang Pasar Tanjung Medan yang berada katagori Terimplementasi berjumlah 13 orang, pada katagori Cukup Terimplementas berjumlah 7 orang, dan pada katagori Kurang Terimplementasi tidak ada.Bearti penilaian pedagang Pasar Tanjung Medan terhadap item yang di nilai apakah dalam pelaksanana pengelolaan Pasar sudah menetapkan Sop pasar dengan baik,dan bertanggung jawab dengan tugas pengelola pasar dengan masing- masing tersebut menunjukkan interval “Terimplementasi”

Berdasarkan wawancara sama Ibuk Nindi mengenai indikator Struktur Birokrasi beliau menjawab:

“Menurut saya semua petugas sudah bertanggung jawab dalam bekerja walaupun ada keluhan dalam bertugas. Contohnya petugas kebersihan, petugas redistribusi pasar. Tetapi mereka sudah melaksanakan sesuai Prosedur atau SOP yang berlaku. Saran saya teruntuk semua petugas pengelolaan Pasar Tanjung Medan baik di bidang kebersihan maupun di bidang redistribusi pasar bersungguh-sungguh lah menata pasar desa dosan menjadi lebih baik lagi. Dan selalulah menjaga kebersihan pasar terutama sampah, jaga lah kebersihan diwilayah pasar Tanjung Medan Desa Dosan Tersebut”.

(Wawancara 7 Agustus 2020 Pukul 9.00 WIB)

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Struktur Birokrasi secara keseluruhan sudah menetapkan Sop dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing- masing.walaupun ada keluhan dalam bertugas.akan tetapi mereka sudah melaksanakan sesuai dengan Prosedur atau SOP yang berlaku.

Berdasarkan observasi untuk indikator Struktur Birokrasi peneliti ini melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan informasi. Peneliti mendapatkan informasi bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan pasar sudah menetapkan SOP dan sudah bertanggung jawab tugas masing- masing sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator “Terimplementasi”.

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Pasar Tanjung Medan Menegnai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komunikasi	15 (75%)	1 (1%)	4 (20%)	20
2	Sumber daya	7 (35%)	11 (55%)	2 (10%)	20
3	Disposisi	3 (15%)	2,5 (12,5%)	14,5 (72,5%)	20
4	Struktur birokrasi	10 (1%)	3,5 (35%)	6,5 (65%)	20
	Jumlah	35	18	27	80
	Rata- rata	8	5	7	20
	Persentase %	2%	9 %	35%	100 %

Sumber: Data Hasil Olahan 2020

Dari tabel V.8 diatas tentang Rekapitulasi Tanggapan Responden Pasar Tanjung Medan Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak diketahui rata- rata

bahwa sebanyak 8 orang atau 2% yang mengatakan Terimplementasi, kemudian sebanyak 5 orang atau 9% mengatakan Cukup Terimplementasi selanjutnya yang mengatakan Kurang Terimplementasi 7 orang atau 35% responden.

Mencermati analisa diatas dari hasil kuisioner, wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak dikategori **Cukup Terimplementasi**. Artinya dari beberapa indikator tersebut masih ada yang belum maksimal, karena masih kurangnya sumber daya pendukung maupun sumber daya manusia sehingga pengelolaan pasar Tanjung Medan belum berjalan secara maksimal.

C. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya operasional pasar Tanjung medan tersebut karena masih kurangnya minat pengunjung yang berbelanja di sana. Oleh karena itu menghimbau kepada masyarakat pusako supaya berbelanja ke pasar

Dosan. Dengan adanya partisipasi masyarakat setempat pasar akan mudah untuk berkembang.

2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Pasar Tanjung Medan belum memadai seperti tempat parkir fasilitas umum, musholla dan toilet tersebut.
3. Kurangnya Sumber Daya pendukung seperti fasilitas yang belum memadai seperti yang diinginkan oleh masyarakat , alasannya lokisinya jauh dari pemukiman masyarakat apalagi musim kemarau sangat berdebu jalanya.
4. sebagian bidang yang menggunakan SOP atau unit terkecil yang di buat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pengelolaan pasar. Dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sedang dalam proses mengharap SOP disemua bidang tersebut, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan analisis yang penulis lakukan, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dari itu penulis telah menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak (Studi kasus Pasar Tanjung Medan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator Komunikasi yang memiliki item penilaian menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat dan menyampaikan pesan oleh seseorang melalui media tertentu berada pada kategori Terimplementasi, karena Kepala UPTD Pengelolaan Pasar sudah memberikan informasi kepada petugas pasar secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media onlinen yang aktif dan kita juga memberikan laporan kepada tugas pasar itu biasanya melalui broadcast whatsapp..
2. Untuk indikator Sumber Daya yang memiliki item penilaian sarana/prasarana dalam pengelolaan pasar dan melaksanakan pengelolaan pasar berdasarkan struktur organisasi berada pada kategori Cukup Terimplementasi, karena sarana dan prasarana belum memadai untuk

pembangunan pasar. Dimana sarana/prasarana tersebut sangat membutuhkan, bagaimana mereka mau berbelanja disana kalau tempatnya kurang memadai.

3. Untuk indikator Disposisi berada pada katagori Kurang Terimplementasi, karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian lambat dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi mereka beusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan pekerjaannya, dan belum pernah menerima perlakuan atau tindakan yang kurang enak dari petugas pasar tersebut.
4. Untuk indikator Struktur Birokrasi dengan item penilaian melakukan SOP dan melaksanakan pragmentasi/ sudah bertanggung jawab dengan tugas masing- masing berada pada katagori Terimplementasi. karena sudah menetapkan SOP dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing.walaupun sebagian bidang ada yang belum menggunakan SOP tetapi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian sedang dalam proses mengharapkan semua bidang menggunakan SOP tersebut.
5. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja dipasar Tanjung Medan dikarenakan lokasi pasar yang tidak strategis.

- Sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang lengkap dan belum memadai seperti kios, penataan kios berdasarkan jenis dan barang belum selesai.
- Kurangnya sumber daya pendukung seperti fasilitas yang belum memadai seperti yang diinginkan masyarakat, alasnya lokasi jauh dari pemukiman masyarakat apalagi musim kemarau sangat berdebu jalannya.
- Belum ada SOP diseluruh bidang pasar atau unit terkecil yang di buat oleh dinas perdagangan dan perindustrian terkait dengan pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak Kecamatan beserta Kepala UPTD dan pengurus menghimbau kepada masyarakat pusako diarahkan untuk berbelanja di Pasar Desa dosan agar pembangunan pasar yang di buat untuk di jadikan pasar kecamatan tidak sia-sia.
2. seharusnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan lagi, meningkatkan kompetensi pedagang yang bisa menarik pembeli supaya berbelanja disana, pemerintah harus bisa menata ulang kios agar tersusun secara rapi.
3. Seharusnya sarana pendukung harus memadai karena sangat diperlukan untuk melancarkan sebuah pasar yang ada di Desa Dosan. supaya pedagang merasa nyaman pembelipun juga merasa nyaman. dan mereka memohon kepada pemerintah setempat supaya pasar yang ada di Desa Dosan

tersebut harus diperhatikan baik, baik bagaimana caranya supaya pasar itu bisa berkembang pesat dan bisa menambah juga pendapatan para pedagang dan masyarakat pun berharap supaya jalan menuju pasar bisa disegerakan diaspal karena kalau musim hujan jalannya sangat licin.

4. Seharusnya pengelolaan pasar harus bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan perindustrian supaya meningkatkan kompetensi pedagang melalui sosialisasi dengan masyarakat, mereka harus mendukung pasar kita lebih maju, biar mereka berbelanja di Pasar Tanjung Medan jangan berbelanja ditempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh publishing
- Zulkifli .2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* . Pekanbaru: UIR press
- Yusaa, Tarmizi., & Andry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Damai.
- Duun , W William. 2000. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi aksara
- Suharto, Edi 2012. *Analisis kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono. 2011. *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Wahab, Soliehin Abdul .2005.*Analisis Kebijakan dari Formulasi keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Soliehin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model –Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Askara.
- Syafiie, Inu Kencana.2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT.Bumi askara
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar ilmu pemerintah Bandung*, PT. Repika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasalong , Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*.Bandung : Alfabeta.

- Pasalong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasalong, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang, 2006. *Filsafat Administrasi* . Jakarta: Bumi Aksara
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian* .Depok : PT Raja Grafindo persada.
- Zaini Ali, Raden., 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru-Riau, Penerbit Marpoyan Tujuh Publishing.
- Thoha, Mitha 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
- Akdun, 2009. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung :Alfabeta
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan publik*. Jakarta, Penerbit Alex Media Kompitindo.
- Nugroho, D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi , Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT. Elex Media Kompitindo.
- Samsudin Indradi, Sjamsiar, 2016. *Dasar – Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Syafri, Wirman, 2012 *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan keungan Desa*. Bandung: Fokus media.
- Saifuddin, 2014. *Pengelolaan pembelajaran Teoritis dan praktis*. Yogyakarta: Deepublish.

Sumber Dokumentasi

Buku Pedoman penulisan Usulan penelitian , Skripsi, dan kertas kerja mahasiswa, 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru

Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 tentang pembentukan , kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Sumber internet

<http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip2undip.ac.id

<http://www>. Pengertian menurut para ahli .net/ pengertian- pengertian para ahli.

Merlian, Deseti Wahyu. 2014. *Implementasi pasal 18 peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional (study di Dinas Pasar kota malang)*. fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang: Jurnal Ilmiah. 2014